



Budaya Egalitarian Pemerintah Desa dalam Perbaikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Rahmatiah
Dondick W. Wirotto
Zulaecha Ngiu
Universitas Negeri Gorontalo

Salfa Boki
BAPPPEDA Provinsi Gorontalo

Salma Rivani Luawo
Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Pos-el: rahmatiah@ung.ac.id

DOI: 10.32884/ideas.v8i4.1032

Abstrak

Tujuan penelitian ini, untuk menguraikan permasalahan budaya egalitarian konsep kekuasaan BUMDes di Kabupaten Gorontalo Utara. Metode yang digunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa (1) Pola pikir masyarakatnya yang masih minim dalam membuat inovasi produk dari kekayaan alam dan budaya yang dimiliki, (2) Program kewirausahaan yang didukung oleh dana desa belum dapat mendorong perubahan yang meningkat dalam pertumbuhan ekonomi desa, dan (3) Belum ada kerjasama dengan pihak eksternal dalam membangun jaringan pasar untuk menjual produk-produk yang inovatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, konsep budaya egalitarian terhadap perubahan birokrasi BUMDes dapat dilakukan apabila mendapatkan dukungan dari agen aktor usaha.

Kata Kunci

Dana desa, BUMdes, pemerintah desa, egalitarian, inovasi

Abstract

The purpose of this study is to describe the egalitarian cultural problems of the concept of BUMDes power in North Gorontalo Regency. The methods used qualitative research methods. Based on the results of the study it was found that; (1) The mindset of the community is still minimal in making product innovations from their natural and cultural wealth; (2) The entrepreneurship program supported by the Village Fund has not been able to encourage increased changes in the economic growth of the village, and (3) There has been no cooperation with external parties in building a market network to sell innovative products. So it can be concluded that, the concept of egalitarian culture towards changes in the bureaucracy of BUMDes can be carried out if it gets support from business actor agents.

Keywords

Village fund, BUMdes, village government, egalitarian, innovation

Pendahuluan

Membangun Indonesia dari pinggiran yang menitikberatkan desa dan masyarakatnya sebagai subjek dan objek pembangunan menjadi perhatian pemerintah. Pada dasarnya desa memiliki kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya. Perbaikan performa pelayanan publik oleh pemerintah desa dalam menerapkan sistem pemerintahan model CERIA lebih mengedepankan prinsip-prinsip egalitarian. Di mana orang-orang yang berkepentingan pada sebuah pelayanan ingin dianggap sebagai sebuah komunitas yang suaranya didengar dalam pembuatan keputusan, aturan, agar bisa ikut bertanggungjawab terhadap keberadaan dan kelangsungan pelayanan publik tersebut (Simmons, 2016). Seperti dalam mengemban kepercayaan yang diamanahkan dalam pemanfaatan dana desa yang diterima dari tahun 2015-2020 dan diperuntukkan membiayai dua kegiatan utama, telah diatur melalui Perbup Nomor 22 Tahun 2018 (sesuai prioritas yang ditetapkan Permendes Nomor 19 Tahun 2017) yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemanfaatan dana desa yang begitu besar harus didukung oleh kualitas sumber daya manusia dari aparatur pemerintah dan masyarakat memerlukan kompetensi *human capital dan social capital* untuk mengelola



sumber dana tersebut agar efektif dan menciptakan suatu nilai tambah untuk *sustainable revenue* (Rahmatiah, Wirotto, & Taan, 2019).

Model CERIA merupakan formulasi untuk memberikan pelayanan publik sebagai upaya menepis anggapan masyarakat perihal birokrasi berbelit-belit, lamban, kaku, rentan dengan politisasi (Paskarina, 2015). Tulisan ini mengkhususkan membahas pada kegiatan program pemberdayaan masyarakat yakni BUMDes. Efektivitas penggunaan dana desa menjadi tantangan yang besar bagi semua pihak yang terkait, karena pada kenyataannya masih ditemukan bahwa dana desa belum optimal dalam mengembangkan BUMDes pada tataran tujuan yang diharapkan oleh Perda Kab. Gorontalo Utara No. 3 Tahun 2017 tentang BUMDes antara lain: 1) peningkatan ekonomi desa; 2) optimalisasi aset desa dan kemakmuran masyarakat; 3) peningkatan tata kelola sumber daya desa; 4) membangun usaha desa dengan menarik investor dalam hal ini pihak ke tiga; 5) terbukanya peluang market; 6) adanya akses lapangan kerja; 7) terpenuhinya kualitas kesejahteraan masyarakat desa; 8) adanya *income* desa.

Berdasarkan capaian tujuan tersebut, tentu belum optimal pada keseluruhan tujuan sehingga peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek (ekonomi, sosial, pendidikan, dan lain-lain) masih rendah, sehingga dapat dikatakan pengalokasian dana desa belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat desa. Padahal menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani (2017) dana desa memberikan kesempatan kepada desa-desa di seluruh Indonesia sebagai garda terdepan dalam mengotimalkan tugas, peran, dan fungsi pada pengelolaan desa, pemerintahan desa, dan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan hidup pada seluruh masyarakat melalui pengelolaan potensi desa dengan sentuhan inisiasi, kreatifitas, inovatif dan penuh kesadaran dari semua pihak untuk bersinergi, baik aparat desa maupun masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan. (Tiara Mara Antika, Anung Rachman, & Rendya Adi Kurniawan, 2022) mengemukakan bahwa, konteks pembangunan desa melalui BUMdes merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Husain, Moonti & Maruwae (2022) menunjukkan bahwa, 53,7% badan usaha milik desa (BUMdes) memberikan pengaruh pendapatan ekonomi masyarakat yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik.

Terlepas dari urian diatas, sejatinya BUMDes yang tidak ditunjang dengan sistem birokrasi desa yang baik, tentu hal ini akan sangat berpengaruh pada evektivitas tata kelola desa. (Djafar, 2011). Hal tersebut sejalan dengan pandangan Sajogyo yang mengemukakan bahwa, dalam pelaksanaan tata kelola desa yang baik membutuhkan reformasi birokrasi sosio-kultural yang menegaskan keteladanan kepemimpinan yang menjadi titik urgensi dalam mewujudkan birokrasi yang terbuka khususnya tata kelola BUMdes (Arditama, 2013). Kenapa reformasi birokrat penting bagi tata kelola BUMdes, karena birokrat merupakan aktor utama yang terlibat dalam menentukan maju atau tidaknya sebuah program yang dijalankan (Hamzah 2014). Sejatinya Hajat hidup orang banyak merupakan titik sentral perhatian birokrasi sehingga informasi yang diterima oleh pelaksana birokrasi perlu diteliti kebenarannya untuk menghindari adanya kegagalan publik *service* dan memberikan pelayanan secara adil kepada para *stakeholders*. Peningkatan kepemimpinan lokal dan pembangunan kapasitas kelembagaan memantapkan upaya reformasi atas berbagai elemen masyarakat termasuk pemberdayaan organisasi masyarakat sipil, juga penting untuk dipertimbangkan (Prasojo & Holidin, 2018).

Dalam konteks *behavioral consequences* bahwasanya perilaku bisa baik dan bisa buruk yang dapat menghasilkan konsekuensi berupa *reward* maupun funisment dari kemampuan individu atas *locus of control* melalui internal control dan eksternal control (Kiryanto & Tyas, 2015). Ia menjelaskan bahwa internal control adalah tingkatan dimana seseorang individu berharap bahwa *reinforcement* atau hasil dari perilaku mereka bergantung pada karakteristik personalnya. Sedangkan *eksternal control* adalah tingkatan dimana seseorang berharap bahwa *reinforcement* sebagai fungsi dan kesempatan, keberuntungan, atau takdir yang dibawa kendali yang lain atau tidak bisa diprediksi. Weberian berpendapat bahwa briokrasi merupakan wadah terhadap pola penyatuan lembaga (Wakhid, 2011).

Wrong mengemukakan bahwa birokrasi juga dimaknai sebagai organisasi yang sengaja dibentuk untuk mencapai satu tujuan fungsional tertentu, bersifat hirarkis, ada pembagian kerja secara detail, dan mereduksi individu-individu menjadi sekumpulan kecil dalam mesin besar (penugasan yang spesifik (Aritama, 2013). Lebih



khusus, Weber menjelaskan bahwa birokrasi harus dijalankan secara rasional pada masyarakat modern yang didasarkan pada aturan-aturan formal dan legal, bukan didasarkan pada otoritas tradisional Setiyono dalam (Surur 2019). Sistem kewenangan birokrasi tradisional dengan birokrasi rasional jauh berbeda implementasinya. Jika pada birokrasi tradisional, menempatkan pimpinan diatas segala-galanya, maka birokrasi rasional menempatkan pemimpin birokrasi memiliki otoritas pada hukum yang berlaku, begitupula ketaatan pegawai bukan pada pimpinannya tetapi pada aturan yang ditetapkan, sehingga berganti pemimpin adalah hal yang biasa dan tidak terjadi masalah-masalah dalam birokrasi, karena pedomannya adalah aturan yang sudah baku. (Surur, 2019). Pembangunan akan berhasil apabila menjalankan pengelolaan sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen modern dan sikap, perilaku, dan kemampuan teknisnya melalui sistem dan aparatur yang mampu, tanggap, dan kreatif (Sajogyo, 2011). Model pemerintahan CERIA sebagai manajemen modern adalah suatu model pemerintahan yang diterapkan di Kabupaten Gorontalo Utara.

CERIA singkatan dari Cerdas, Empati, Ramah, Inovatif, dan Amanah yang mencerminkan nilai-nilai luhur kemanusiaan didasarkan atas prinsip-prinsip partisipatif, transparan, integratif-interkoneksi, kultur religious, dan akuntabel. Indikator-indikator yang termuat dari singkatan ini tampak jelas mengandung unsur-unsur budaya egalitarian dari para birokratnya untuk mengedepankan pemberian pelayanan semaksimalnya kepada seluruh masyarakatnya. Hefner menyampaikan bahwa untuk membangun budaya egalitarianisme menjadi karakter manusia melalui prinsip keseimbangan, keadilan, amanah, dan menghargai orang yang berbeda pendapat (Ritaudin, 2012). Secara garis besar, bahwa budaya egalitarian merupakan perilaku individu yang menunjukkan komitmen atas persamaan hak, kesempatan meraih kesejahteraan, kebahagiaan dan kesempatan dalam tatanan berkehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, implementasi Model Ceria dengan mengusung prinsip-prinsip egalitarian dari pemerintah desa dan pengelola BUMDes dapat menghadapi tantangan.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dalam pendekatan analisis sosilogis merupakan instrument penelitian yang berusaha mengumpulkan data secara alamiah atau berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. (Sugiono, 2016). Adapun lokasi penelitian di Desa Tri Rukun Kecamatan Wonosari. Adapun teknik pengumpulan menggunakan triangulasi data yang pengumpulannya menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari keterlibatan tokoh masyarakat, pemerintah desa dan masyarakat Tri Rukun. Untuk data sekunder menggunakan sumber literatur yang bersesuaian dengan objek kajian penelitian yang bersesuaian dengan tema yang digagas oleh penulis.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Gambaran Umum BUMDes di Kabupaten Gorontalo Utara

Kabupaten Gorontalo Utara memiliki potensi sumber daya alam yang memadai. Potensi tersebut antara lain: pertanian (jagung, padi, dan durian), kelautan (hasil tangkapan ikan, budi daya ikan, dan rumput laut), pertambangan, pariwisata, dan budaya. Hampir semua potensi yang disebutkan, belum dikelola menjadi produk yang inovatif disebabkan karena tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat masih minim sementara untuk inovasi produk sangat membutuhkan kecerdasan sebagai modal manusia menjadi agen perubahan dalam menggerakkan BUMDes yang maju dan mandiri. Selain inovasi produk, dibutuhkan juga inovasi hubungan sosial dalam kerja organisasi pelayanan publik agar bisa membuahkan hubungan sosial yang baik dengan pengguna pelayanan publik, perlu adanya forum bersama antara manajer, pegawai, dan perwakilan pengguna pelayanan publik untuk menemukan informasi dan jalan keluar bagi kerenggangan hubungan sosial dalam performa pelayanan yang optimal. Inovasi ini adalah strategi baru dan perilaku baru dalam memberikan pelayanan publik yang optimal dengan visi budaya organisasi yang berparadigma egalitarian (Simmons, 2016). Adapun tahapan inovasi BUMDes yang dapat dilakukan; (1) Penyusunan standar operasional tata kelola BUMdes; (2) Pembentukan mekanisme baru untuk suara konsumen BUMDes; (3) Pelatihan karyawan garis-depan tentang aktivitas komunikasi yang menyentuh tentang (bagaimana membuat presentasi dan menggunakan frasa yang bisa menyentuh sikap positif orang lain, dan bagaimana mengulang presentasi dan penggunaan frase tersebut dengan konsisten) sehingga dalam proses pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Budaya egalitarian adalah manifestasi dari kecerdasan individu dalam mengembangkan dan memaksimalkan potensi akal, emosi, dan nuraninya agar senantiasa dapat hidup dengan seimbang, bersinergi, dan komprehensif. Kecerdasan inilah, manusia dapat diakui eksistensinya dalam memperjuangkan dan meningkatkan kualitas hidupnya menghadapi berbagai tantangan yang kompleks melalui proses *life long education*. Kecerdasan melingkupi perihal *multifile intelligence*, yakni kecerdasan intelektual (*Intelligence Quotient*), kecerdasan emosional (*Emotional Quotient*), dan kecerdasan spiritual (*Spiritual Quotient*). Tiga kemampuan ini sangat penting dalam pemanfaatan dana desa agar dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sukses tidak terlepas dari tiga kecerdasan yang ada dalam dirinya dan senantiasa mendorong menciptakan peluang dengan beragam keunggulan produk dengan merubah karakter produk, merekayasa produk untuk menghasilkan produk yang baru, selain perlu ditunjang dengan melaksanakan pekerjaan tepat waktu, kreatifitas dalam berbagai kegiatan dan memotivasi diri secara efektif untuk meningkatkan kemampuan pengelolah usaha.

Hal yang tidak kalah pentingnya adalah mempertahankan komitmen yang dibangun dari awal memulai usaha yang didasari oleh berbagai kejadian hidup yang dialami secara pribadi dan kolektif dan menggunakannya sebagai sumber untuk mengembangkan potensi diri meraih impian. Komitmen juga akan membentuk motivasi berwirausaha terutama pada terbukanya/tertutupnya akses modal sosial yang sudah ada maupun yang baru. (Rahmatiah, Wirotto, & Taan, 2019). Pada prinsipnya, mempertahankan kelangsungan BUMDes tidak sekedar mempertahankan keuntungan usaha dan pengetahuan bisnis dan manajerial tetapi perlu adanya hubungan dengan pelanggan dalam konteks pelayanan publik (*public service*) harus lebih menitikberatkan keadaan hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan transaksional yang sepele. Jadi, segala pencapaian kebutuhan dan keinginan, di samping motivasi harus kuat, juga didukung oleh faktor lain seperti komitmen dan kemampuan modal manusia dan modal sosial. Faktor-faktor ini dapat digerakkan oleh kebutuhan berafiliasi diri. Untuk bisa menyelesaikan tantangan utama ini pemerintah desa harus mempersiapkan kerjasama dengan berbagai pihak, dari dalam daerah maupun luar daerah, yang dapat diajak berkomitmen untuk mendorong BUMDes dan pengusaha lokal agar memiliki motivasi yang kuat untuk membangun usaha yang unggul dan tangguh dan mudah dalam proses pendiriannya.

Konsep Egalitarian sebagai Aktualisasi dari Program CERIA BUMDes

Dalam konsep pelayanan publik yang berbasis egalitarian, kesempatan pengguna pelayanan untuk memberikan pendapat bagi kualitas pelayanan publik akan menentukan persepsi mereka pada pelayanan publik tersebut. Sebuah pelayanan yang berani mengoptimalkan pelayanannya akan semakin berani untuk terbuka terhadap berbagai pendapat dari pengguna pelayanan publik, sampai akhirnya ia mendapatkan pendapat yang bagus pada setiap kesempatan dari pengguna pelayanan maka itu pertanda ia memiliki persepsi yang baik dari pengguna berkaitan kualitas hubungan dan performa pelayanan (Simmons, 2016). Namun sebagaimana yang terjadi di negara-negara demokrasi, lemahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah karena lemahnya penegakan hukum (Tjiptoherijanto, 2014). Maka mungkin jalan keluarnya adalah kolektivisme dalam mendeskripsikan seperti apa pelayanan BUMDes yang baik untuk untuk memajukan kewirausahaan di desa dan merancang sistem yang mampu menjalankan secara efektif program-program kewirausahaan yang berkualitas dan tinggi penjualannya dan cermat terhadap resiko-resiko yang akan dihadapi. Harapannya melalui kolektivisme ini tumbuh kepercayaan terhadap BUMDes melalui komitmen aparat BUMDes terhadap program-program yang dirumuskan dan dijalankan bersama, sehingga dana desa benar-benar bisa diserap oleh masyarakat melalui program tersebut.

Tantangan yang akan dihadapi adalah kemampuan organisasi pemerintahan desa dan BUMDes untuk bisa bekerjasama dengan para pengusaha desa yang memiliki budaya usaha yang beragam, yang diwarnai oleh kepemilikan secara pribadi, kelompok, maupun komunitas masyarakat. Kemungkinan yang terjadi di dalam organisasi pemerintahan desa dan BUMDes adalah *counter-habitus* egalitarianisme (Stahl, 2015), yaitu kumpulan orang yang tidak menginginkan/mengaspirasi mobilitas sosial keatas, yaitu yang mementingkan komitmen kepada komunitas yang tidak menginginkan adanya kemajuan kewirausahaan di desanya. Ini kemungkinan terjadi karena aparat BUMDes datang dari budaya miskin yang sulit menerima kenyataan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi akan membuat kelompok masyarakat pengusaha semakin kaya, walaupun secara umum akan mengangkat kesejahteraan banyak warga desa. Jika kumpulan ini terlalu besar maka akan cenderung membatasi Rulinawaty dkk, (2020) para pengusaha pengguna layanan BUMDes untuk dilibatkan



dalam penyusunan program dan sistem pelayanan kewirausahaan. Namun, diantara empat model defisit birokrasi (Pratama, 2017), prinsip egalitarian yang paling memungkinkan BUMDes bisa mengalami perubahan yang lebih siap untuk memajukan kewirausahaan di desa.

Tabel 1

Hasil Penelitian 13 BUMDes di Kabupaten Gorontalo Utara

Capaian Program BUMDes	Status Capaian-Capaian Bumdes	Faktor Penyebab Capaian Bumdes
Tata kelola hasil pertanian dan hasil laut	Belum tercapai	Minimnya inovasi
Peningkatan usaha melalui UMKM	Belum tercapai	Dana yang belum mencukupi

Pembahasan

Budaya Egalitarian Sebagai Identitas BUMDes

Ditengah-tengah lesunya perekonomian nasional dan rendahnya tingkat pendapatan per kapita, maka sangat penting untuk menumbuhkan budaya yang mendukung kewirausahaan Linan, Romero dkk, (2013); Irizo, Ruiz, & Figueora, (2020). Desentralisasi politik tidak akan mendukung kegiatan kewirausahaan individual, jika terlalu memproteksi daerah dari kreativitas yang bisa dibangun melalui kerjasama yang terbuka antara pengusaha lokal dan pengusaha luar dimana pemerintahan daerah harus membuka wawasan kewirausahaan mulai dari mempelajari unsur-unsur penting yang diperlukan oleh pengusaha yang akan memperkuat organisasi usahanya pada saat baru berdiri: antara lain: (1) Berprinsip untuk terus menerus membangun motivasi yang kuat untuk membangun usaha yang tangguh; (2) Berprinsip untuk membantu merencanakan penguatan dan memperbaiki kebijakan yang pro pada pertumbuhan kewirausahaan mulai dari saat pembinaan untuk mencapai kompetensi awal yang baik, kemudian memelihara kompetensi standar organisasi dan manajemen kewirausahaan yang kompetitif dan cepat beradaptasi dengan kondisi ketidakpastian yang tinggi.

Strategi dan Upaya Pengelolaan BUMDes

Untuk mencapai kompetensi lanjut dalam membangun jaringan internasional dalam produksi, distribusi dan pemasaran (Wirotto, 2016). (3) Kebijakan yang pro pada pertumbuhan kewirausahaan dimulai dengan membangun budaya yang terbuka dengan para pengusaha yang telah mencapai kompetensi standar dan lanjut secara mapan, baik dalam rangka menambah wawasan dan informasi pemerintah lokal dari para praktisi bisnis tersebut maupun menjalin kerjasama bisnis. Pemerintah lokal yang berhasil menjalankan poin ini diasumsikan telah berhasil membangun pelayanan publik untuk meningkatkan pemberdayaan kewirausahaan secara egalitarian yang respon terhadap kebutuhan individu; (4) Mulai membangun sejumlah kerjasama usaha yang jelas antara warga desa yang telah memiliki ide produksi yang inovatif dengan individu atau lembaga yang berasal dari wilayah lain yang memiliki potensi pengembangan kewirausahaan yang diperlukan agar ide tersebut dapat diterapkan menjadi sebuah produksi yang bernilai jual. Poin 4 ini dapat dijalankan dengan namun harus terpenuhi syarat *institutional equality*, yaitu mengakui bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama dan otonomi pribadi, sehingga lembaga publik ini, seperti BUMdes, dapat secara objektif dan tidak menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan dalam memilih warga yang hendak didukung aktivitas kewirausahaannya (Swaab & Galinsky, 2014).

Pemerintah lokal yang mampu membangun sistem agar poin ke-4 ini berjalan diasumsikan bahwa ia telah mampu mengaplikasikan poin ke-3 dengan baik dan mau benar-benar mewujudkan perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan partisipasi kerjasama usaha antar lembaga dan antar daerah. Menjaga kelangsungan sistem BUMdes dan lembaga lainnya yang terkait untuk melaksanakan point ke-3 dan ke-4 dengan mengacu pada prinsip pada poin ke-1 dan ke-2, agar masyarakat desa mampu menjadi masyarakat yang dapat menjalin kerjasama keluar daerahnya maupun kerjasama dengan pihak yang datang ke daerahnya, sehingga bisa keluar dari sifat-sifat sulit berkompetisi dan tindakan menghindarkan diri dari kemajuan (Stahl, 2015). sikap dan perilaku inferior (merasa tidak mampu karena selalu menyalahkan kondisi kemiskinan/ketidakmampuan yang dialaminya) (Steckermeier dan Delhey, 2018). Untuk bisa menyelesaikan tantangan utama ini pemerintah desa harus mempersiapkan kerjasama dengan berbagai pihak, dari dalam daerah maupun luar daerah, yang dapat diajak berkomitmen untuk mendorong BUMDes dan pengusaha lokal agar

memiliki motivasi yang kuat untuk membangun usaha yang unggul dan tangguh dan mudah dalam proses pendiriannya.

Simpulan

Penelitian ini merupakan analisis sosiologi organisasi terhadap prinsip-prinsip pemerintahan CERIA yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara (Pekab Gorut). Pekab Gorut perlu untuk mencermati kemungkinan bahwa CERIA hanya akan menjadi jargon pemerintah yang tenggelam karena kekakuan organisasi ala Weberian yang tidak dapat menyelesaikan penyakit birokrasi, sehingga penyakit ini pun akan merusak kemurnian tujuan badan-badan pemerintahan desa seperti BUMDes dalam rangka memajukan kewirausahaan.

Prinsip CERIA harus mampu menjadi lebih luwes dengan mengacu pada pendekatan egalitarian terhadap perubahan birokrasi BUMDes agar bisa merespon cepat dan beradaptasi dengan baik terhadap unsur-unsur kewirausahaan yang membutuhkan dukungan kebijakan, arah inovasi, dan strategi tindakan usaha yang tangkas dan harus melibatkan banyak agen dari aktor usaha, aktor inovasi, dan aktor pemangku kebijakan.

Penelitian ini sebatas ingin memperlihatkan bahwa telah ada kajian teori dan konsep yang tujuannya adalah agar terjadi perubahan birokrasi pemerintahan yang agile dan berasas budaya egalitarian, sehingga tidak terlalu mendalam dalam menjelaskan bagaimana konsep perubahan tertentu secara strategi dan langkah-langkahnya. Oleh karena itu, beberapa penelitian yang penting dapat dilakukan oleh para akademisi selanjutnya adalah, misalnya dalam disiplin ilmu sosiologi, politik, dan pemerintahan adalah mengenai hubungan sosial dan politik antara pemerintahan desa dengan pengusaha-pengusaha di desa, dengan urgensi penelitiannya adalah untuk mengetahui berbagai potensi peningkatan kewirausahaan desa dari hubungan tersebut. Topik lain juga bisa berupa penilaian atau persepsi masyarakat terhadap pelayanan BUMDes dalam memajukan usaha-usaha masyarakat desa

Daftar Rujukan

- Arditama, E (2013). Mereformasi Birokrasi dari Perspektif Sosio-Kultural: Inspirasi dari Kota Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Vol. 17. No. 1, Juli 2013. ISSN 1410-4946.
- Djafar, W. (2011). Memotong Warisan Birokrasi Masa Lalu, Menciptakan Demarkasi Bebas Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 8 No. 2-Juni 2011.
- Hadi, R., Dkk (2015). The Role of Human Capital in the Development of Sulam Karawo Creative Industry in Gorontalo. *International Journal Of Academic Research, Part B Social Science And Humanities* Vol. 7. No. 1, Januari 2015.
- Kiryanto Dan Tyas, N. A. (2015). Antiseden dan Konsekuensi Perilaku Disfungsional Auditor. *Conference In Business, Accounting, and Management. Unisula Sultan Agung Islamic University*. ISSN 2302-9791, Vol. 2. No. 1 May 2015.
- Liñán, F., Romero, I., & Fernandez-Serrano, J. (2013). Necessity and Opportunity Entrepreneurship: The Mediating Effect of Culture. *Revista De Economia Mundial*, 33, 21–47. <https://www.researchgate.net/publication/235937863>
- Ortega Irizo, F. J., Gavilán Ruiz, J. M., & Jaén Figueroa, I. (2020). The Effect of Economic and Cultural Factors on Entrepreneurial Activity: An Approach Through Frontier Production Models. *Revista De Economía Mundial*, 55, 25–48. <https://doi.org/10.33776/rem.v0i55.3830>
- Paskarina, C. (2015). Mendudukan Birokrasi; Melacak Pertarungan Kuasa di Balik Wacana Reformasi Birokrasi. *Ilmu Pemerintahan Cosmogoy*, 1(1), 2442-5958.
- Prasojo, E., & Holidin, D. (2018). Chapter 3: Leadership and Public Sector Reform in Indonesia. *Public Policy And Governance*, 53–83. <https://doi.org/10.1108/S2053-769720180000030003>
- Pratama, A. B. (2017). Bureaucracy Reform Deficit in Indonesia: A Cultural Theory Perspective. *Journal Of Public Administration and Governance*, 7(3), 88. <https://doi.org/10.5296/jpag.v7i3.11519>
- Rahmatiah, Wirotto, D., & Taan, H. (2019). Business Continuity, Motivation, and Social Conditions of Young Enterperneus. *Economics & Sociology*, 12(4), 166-182.
- Rulinawaty, Samboteng L., Sofjan, A. dan Hasanuddin. (2020). Crafting Agile Bureaucracy: Transforming Work Ethics of Civil Servants and Organisational Culture of Bureaucracy in Indonesia. *International Journal of*



- Innovation, Creativity and Change*, 12(11), 692-714.
https://www.ijicc.net/images/Vol12/Iss11/121136_Rulinawaty_2020_E_R.Pdf
- Sajogyo & Sajogyo, P (2011). *Sosiologi Pedesaan*. Edisi 11. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Simmons, R. (2016). Improvement and Public Service Relationships: Cultural Theory and Institutional Work. *Public Administration*, 94(4), 933–952.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Surur, M. (2019). Birokrasi Weberian: Proportional Approach. Madani, *Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol.11 No. 2 Agustus 2019*. (P-ISSN 2085-143X)(E-ISSN 2620-8857).
- Stahl, G. (2015b). Egalitarian Habitus: Narratives of Reconstruction in Discourses of Aspiration and Change. in C. Costa & M. Murphy (Eds.), *Bourdieu, Habitus and Social Research: The Art Of Application* (Pp. 21–38). Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137496928>
- Swaab, R. I., & Galinsky, A. D. (2015). Egalitarianism Makes Organizations Stronger: Cross-National Variation in Institutional and Psychological Equality Predicts Talent Levels and The Performance of National Teams. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 129, 80–92. <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2014.05.002>
- Tiara Mara Antika, Anung Rachman, & Rendya Adi Kurniawan. (2022). Pengimplementasian Legenda Calon Arang sebagai Edukasi Budaya Nusantara dan Feminisme Melalui Animasi. *Jurnal Ideas*, 8(3), 1001-1006.
- Tjiptoherijanto, P. (2008). Civil Service Reform in Indonesia. *Comparative Governance Reform In Asia: Democracy, Corruption, and Government Trust*, 8(2), 39–54. [http://doi.org/10.1016/S0732-1317\(08\)17004-X](http://doi.org/10.1016/S0732-1317(08)17004-X)
- Wakhid, A. A. (2011). Eksistensi Konsep Birokrasi Max Weber dalam Reformasi Birokrasi di Indonesia. *Jurnal Tapis Vol. 7. No. 13 Juli-Desember 2011*.
- Wiroto, D. W. (2016). Kapital Sosial dan Kepemimpinan dalam Pengembangan Kompetensi Usaha Mikro dan Kecil Di Era MEA: Sebuah Tinjauan Konseptual Ringkas. In M. Ilyas, R. Junaid, H. Asri. (Eds.). *Kesiapan Daerah Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA): Proceedings Of Universitas Cokroaminoto 2016 National Seminar* (Pp.591-601). Palopo, Sulawesi Selatan: UNCP Press.

